

Liberalisasi Investasi Sektor Perbankan

Arwin Rasyid

SALAH satu agenda pertemuan APEC Business Advisory Council (ABAC) bulan Agustus 2004 di Auckland, Selandia Baru, yakni membahas perkembangan liberalisasi dan dampak investasi asing di beberapa negara, termasuk sektor perbankan. Sebagai anggota ABAC, saya pun mendapat kesempatan mengikuti pertemuan tersebut.

BILA dilihat sejarahnya, isu liberalisasi sebagai suatu fenomena global mendapatkan momentumnya ketika Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) bertemu di Washington, Amerika Serikat, tahun 1989 dan menghasilkan konsensus yang disebut "Washington Consensus" yang berisi 10 butir kesepakatan. Awalnya, kesepakatan itu dijadikan strategi dan resep bagi negara-negara Amerika Latin yang mengalami krisis ekonomi, kemudian dijadikan resep umum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sejak itu, istilah-istilah liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi telah menjadi konsumsi harian di berbagai media massa dan menjadi kebijakan pemerintah sejak pasca-krisis.

Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah sejauh mana liberalisasi investasi asing, khususnya perbankan, di Indonesia? Salah satu cara untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan mengetahui sejauh mana kepemilikan asing pada bank-bank di Indonesia, khususnya 10 (sepuluh) bank terbesar. Ke-10 bank terbesar di Indonesia itu menguasai aset lebih dari 70 persen total aset perbankan nasional. Dari sepuluh bank terbesar di Indonesia, ternyata 8 (delapan) di antaranya ada unsur kepemilikan asing dan 5 (lima) di antaranya menguasai kepemilikan secara mayoritas (tabel 1).

Apabila kita bandingkan dengan beberapa negara tetangga kita, Malaysia, misalnya, dari 10 bank terbesar tidak satu pun dimiliki investor asing baik minoritas maupun mayoritas. Di Thailand, dari 10 bank terbesar, enam di antaranya dimiliki oleh asing dan dua di antaranya adalah mayoritas. Kondisi yang hampir serupa terjadi di Korea Selatan, di mana dari 10 bank

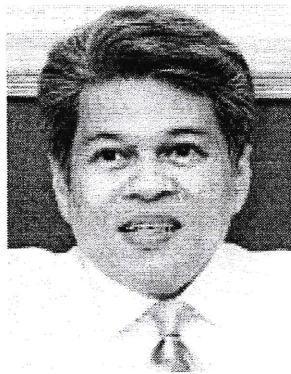
terbesar, tujuh di antaranya ada kepemilikan asing dan tiga di antaranya merupakan kepemilikan mayoritas.

Jika kita bandingkan dari keempat negara di atas, ternyata Indonesia jauh lebih maju dalam hal liberalisasi perbankan. Setidaknya berkaitan dengan deklarasi Bogor, di mana negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang tergabung dalam Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation/APEC) pada tahun 1994 bersepakat untuk mewujudkan perdagangan dan investasi bebas dan terbuka (Free & Open Trade and Investment) tahun 2010 untuk negara-negara maju dan 2020 khususnya yang menyangkut liberalisasi perbankan, ternyata Indonesia sudah cukup maju.

Bagaimana dampak liberalisasi investasi asing tersebut bagi negara-negara Asia? Dari hasil penelitian Profesor J Kimball Dietrich dari University of Southern California di Thailand dan Korea yang disampaikan dalam pertemuan ABAC di Auckland, Selandia Baru, bulan Agustus 2004 menunjukkan bahwa liberalisasi sektor keuangan membawa pengaruh yang positif sekaligus pengaruh negatif.

Dampak positif dari liberalisasi sektor keuangan antara lain tersedianya modal, inovasi produk dan jasa keuangan, strategi pemasaran baru, perbaikan pengelolaan risiko, masuknya teknologi, pengelolaan bisnis yang lebih efisien, peran swasta yang lebih besar atas pembiayaan proyek strategis jangka panjang yang tidak dapat dibiayai pemerintah, terbangunnya jaringan dan akses ke jaringan internasional oleh lembaga keuangan lokal, dan kesempatan training yang berkualitas.

Liberalisasi investasi asing juga membawa dampak negatif.



MYE

Arwin Rasyid

Antara lain, terjadinya pengurangan pegawai (PHK), akuisisi oleh investor yang bukan mitra strategis, berkurangnya fokus pada usaha kecil, dan menguatnya orientasi mencari profit.

♦ ♦ ♦

BAGI Indonesia, banyak orang bertanya sejauh mana bank-bank yang sudah didivestasi (dijual kepemilikannya ke investor asing) dapat mendukung berbagai kebijakan nasional (*national interest*). Dalam hal ini kita harus jaga keseimbangan karena bank-bank yang sudah didivestasi masing-masing berjalan dalam acuan kepentingan komersial (*commercial interest*). Hal ini tidak buruk, tetapi ada kalanya perlu diimbangi dengan "kepentingan nasional". Bagi perbankan nasional, "kepentingan nasional" atau *national interest* misalnya penyaluran kredit ke sektor mikro dan usaha kecil dan menengah serta penyaluran kredit ke daerah-daerah atau provinsi yang masih "tertinggal". Menyalurkan kredit kepada sektor-sektor yang pasca-krisis masih berat tetapi mempunyai potensi untuk maju seperti tekstil dan sepatu, serta memberikan kebijakan khusus untuk sektor atau segmen tertentu.

Bank-bank asing dan campuran di Indonesia lebih memfokuskan bisnisnya pada kota-kota besar yang potensial dengan menawarkan produk-produk kredit konsumtif, misalnya kartu kredit. Hal ini tidaklah salah, tetapi kita juga harus sadar bahwa masih banyak daerah atau provinsi yang memerlukan peran perbankan untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan daerahnya. Kondisi ini tentunya semakin mem-

KEPEMILIKAN ASING PADA 10 BANK TERBESAR DI BEBERAPA NEGARA ASIA

Negara	Ada pemilik asing	Pemilik asing mayoritas
♦ Malaysia	0	0
♦ Korea	7	3
♦ Thailand	6	2
♦ Indonesia	8	5

Sumber: JP Morgan 2003

perkuat pendapat banyak pihak bahwa bank-bank asing lebih mengedepankan kepentingan komersial ketimbang kepentingan nasional.

Pertanyaan yang harus dijawab pemerintah saat ini, berapa bank yang hendaknya dijaga agar tetap berada di bawah pengaruh pemerintah, kalau bukan kontrol pemerintah, karena kita masih negara berkembang? Yang menarik juga adalah di Thailand diberlakukan *one presence policy*, yaitu suatu kebijakan yang melarang investor asing memiliki lebih dari satu kepemilikan pada bank-bank nasional.

Hal ini berbeda sekali dengan yang terjadi di Indonesia, di mana ada beberapa investor atau lembaga keuangan asing yang kehadirannya ada pada lebih dari satu bank. Misalnya Standard Chartered Bank, selain memiliki cabang sendiri di Indonesia juga membeli saham Bank Permata, atau Temasek yang memiliki saham Bank Danamon dan Bank Internasional Indonesia serta DBS yang mempunyai cabang di Indonesia.

♦ ♦ ♦

TAHANAN liberalisasi perbankan kita berada pada situasi yang sulit untuk mundur, berada dalam *point of no return*. Sebagai negara yang telanjur paling liberal dalam hal perbankan, setidaknya di Asia, yang terpenting adalah langkah pemerintah ke depan agar perbankan di Tanah Air mampu berperan menjadi penggerak roda perekonomian nasional, serta kembali ke fungsi utama melakukan intermediasi secara optimal. Bila kita mau meniru kebijakan di Thailand, sangatlah mungkin bank-bank yang telanjur dimiliki oleh satu ke-

"WASHINGTON CONSENSUS"

- 1 Disiplin fiskal
- 2 Prioritas pengeluaran sektor publik yang menghasilkan return ekonomi tinggi dan berpotensi meningkatkan distribusi pendapatan, seperti kesehatan pendidikan dan infrastruktur
- 3 Reformasi sistem perpajakan
- 4 Liberalisasi suku bunga
- 5 Nilai tukar yang kompetitif
- 6 Liberalisasi perdagangan
- 7 Liberalisasi investasi asing secara langsung—termasuk di sektor keuangan dan perbankan
- 8 Privatisasi
- 9 Deregulasi
- 10 Jaminan hak intelektual

lompok investor tertentu harus memutuskan apakah memper-tahankan kepemilikan hanya pada satu bank atau menggabungkan (merger) bank-bank yang dimilikinya. Dengan menjaga kepemilikan beberapa bank di tangan pemerintah, beberapa agenda pemerintah dalam rangka kepentingan nasional dapat diimplementasikan.

Kebijakan lain yang mungkin dapat diterapkan adalah "Regional Banking Policy", yang bertujuan mendorong pertumbuhan bank-bank lokal untuk membiayai berbagai usaha potensial di daerah-daerah. Dalam kebijakan ini, bank-bank yang sebagian sahamnya dimiliki investor asing yang beroperasi di daerah memiliki kewajiban untuk melatih dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia bank-bank daerah sesuai dengan standar perbankan global.

Pada akhirnya, komitmen kita bersama antara pemerintah, praktisi perbankan nasional, dan dunia usaha sangat diperlukan agar liberalisasi berlangsung dengan keberpihakan yang jelas, sinergis, *win-win solution* dan keseimbangan antara kepentingan komersial dan kepentingan nasional.

ARWIN RASYID
Anggota ABAC Indonesia dan
Wakil Direktur Utama Bank BNI